PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN KETERSEDIAAN ANGGARAN KAS TEHADAP OPTIMALISASI REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN

Mustakim[1], RahmiWidyanti[2],Basuki[3]

E-mail: rahmibasuki@gmail.com
E-mail: qiqimmubarok@gmail.com

[1,2,3]Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine and analyze: (1) The partial effect of Budget Planning on the Optimization of Budget Absorption Realization in the Balangan Regency Government, (2) the partial influence of Cash Budget Availability on the Optimization of Budget Absorption Realization in the Balangan Regency Government (3) Simultaneous influence of Budget Planning and Availability of Cash Budget on the Optimization of Budget Absorption Realization in the Balangan Regency Government.

This research was conducted at the Regional Government of Balangan Regency. This type of research is an explanatory research using a quantitative approach. The population in this study were financial managers at 22 Regional Work Units (SKPD) in the Balangan Regency Government. The sampling technique used the saturated sample technique, namely 66 people consisting of 3 financial managers in 22 Regional Work Units (SKPD).data was obtained from the questionnaire results and processed by data analysis techniques using the SPSS (Statistics Program for Social Science) for Windows. Testing the validity using Pearson's Product Moment and for reliability testing using Alpha Cronbach. The classical assumption test uses linearity, normality, heteroscedasticity and multicollinearity tests. Data analysis used multiple linear regression.

Based on the results of data analysis shows that: (1) partially there is no significant effect of Budget Planning on the Optimization of Budget Absorption Realization in the Balangan Regency Government, with the value of t arithmetic (0.572) < t table (1.66). In this study, the planning that has been prepared and proposed does not affect the optimal realization of budget absorption. (2) Partially there is a significant effect of the Availability of Cash Budget on the Optimization of Budget Absorption Realization in the Balangan Regency Government, with the value of t arithmetic (2.955) > t table (1.66). The availability of the cash budget greatly influences the optimization of budget absorption in the Balangan Regency Government. (3) Simultaneously there is a significant effect of Budget Planning and Availability of Cash Budget on the Optimization of Budget Absorption Realization in the Balangan Regency Government, with a value of f arithmetic (71,167) > f table (3.14) and a significance of 0.000 < 0.05.

Keywords: Budget Planning, Availability of Cash Budget, and Optimization of Budget Absorption Realization

PENDAHULUAN

Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah ditujukan untuk menjawab kendala penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan dampak yang cukup besar bagi perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah dituntut untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) sehingga diperlukan reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik. Reformasi manajemen sektor publik sangat ditentukan oleh reformasi di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tolok ukur kinerja pemerintah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah apabila terserap secara maksimal. Penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa pada umumnya lambat bahkan realisasinyaseringkali menumpuk diakhir tahun karena berbagai permasalahan yang dihadapi baik dari aspek administrasi maupun dari aspek teknis.

Keterlambatan dalam penyerapan anggaran pada Pemerintah daerah menjadi salah satu masalah yang terus terjadi pada setiaptahun. Penyerapan anggaran pada Semester pertama sangat kecil tetapi mengalami peningkatan yang signifikan pada Semester kedua terutama pada triwulan keempat yaitu pada akhir tahun anggaran. Hal ini berdampak pada lambatnya realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan atas manfaat yang akan diterima dan dinikmati oleh masyarakat.

Rendahnya penyerapan anggaran dapat dihilangkan apabila pemerintah daerah, dalam hal ini para kepala SKPD dan pejabat pengelola keuangan dapat konsisten dalam membelanjakan anggarannya sesuai dengan perencanaan dan target yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta dokumen penyediaan dana SKPD.

Sistem Perencanaan Anggaran dalam setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sangat berperan penting dalam performa kerja setiap instansi. Semakin matang dan optimal perencanaan yang dilakukan akan sangat memudahkan dalam realisasi program kerja yang telah disusun dan direncanakan dalam satu tahun kedepan yang muaranya adalah kemajuan daerah yang dalam hal ini Kabupaten Balangan yang dapat terlihat dari optimalisasi serapan anggaran pada tahun pelaksanaan secara realistis dan maksimal.

Perencanaan merupakan titik awal dalam setiap penentuan program kerjadalam satu tahun kedepan, proses perencanaan bersumber dari analisis kebutuhandarisetiap SKPD dalammenunjang program kerja yang sudah dirumuskan berdasarkan visi dan misi SKPD yang tentunya berujung kepada kemajuan perekonomian dan perkembangan daerah Kabupaten Balangan yang merupakan kabupaten muda hasil dari otonomi daerah yang tentunyamemiliki target besar harus lebih maju dan berkembang lebih maju lagi.

Berikut data perencanaan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Balangan pada tahun anggaran 2022:

Tabel 1
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Balangan tahun 2022

No.	SKPD	Target	JumlahAnggaran
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	100%	Rp 266.234.071.589
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	100%	Rp 178.655.928.756
3	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	100%	Rp 207.838.615.785
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	100%	Rp 8.216.106.897
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100%	Rp 10.626.989.489
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	100%	Rp 4.608.509.207

7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	100%	Rp	26.739.807.407
8	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	100%	Rp	52.694.626.792
9	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	100%	Rp	13.700.017.294
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	100%	Rp	5.123.754.990
11	DINAS PERHUBUNGAN	100%	Rp	10.590.985.120
12	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	100%	Rp	13.312.176.043
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	100%	Rp	8.830.772.925
14	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	100%	Rp	13.716.345.047
15	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	100%	Rp	17.913.868.095
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	100%	Rp	8.354.679.339
17	SEKRETARIAT DAERAH	100%	Rp	50.075.631.165
18	SEKRETARIAT DPRD	100%	Rp	42.845.649.547
19	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	100%	Rp	13.785.662.175
20	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	100%	Rp	219.939.885.613
21	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	100%	Rp	16.064.142.792
22	INSPEKTORAT	100%	Rp	8.445.919.805
TOTAL ANGGARAN				**Rp 1.198.314.145.872**

Sumber : Badan PengelolaanKeuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Balangan, 2022

Pada tabel 1 diatas dapat dilihat besaran anggaran yang telah direncanakan setiap SKPD dilingkungan kabupaten Balangan sangat besardengan total rencana anggaran sebesar Rp. 1,198,314,145,872. Tentunya besaran dana tersebut lahir dari kajian dan analisa yang sangat matang dalam merumuskan sebuah perencanaan kerja yang ditujukan untuk memajukan perekonomian serta perkembangan daerah yang semakin maju.

Matangnya perencanaan dapat mempengaruhi serapan dan realisasi anggaran ketika tahun pelaksanaan dan anggaran tersebut dicairkan, namun ada faktor lain yang juga turut mempengaruhi maksimalnya serapan anggaran yang telah direncanakanya itu ketersediaan anggaran kas di Bagian keuangan masing-masing SKPD pada saat proses pencairan ketika program kerja yang sudah direncanakan akan dilaksanakan. Ketersediaan anggaran kas disini lebih kepada penjadwalan pengambilan dana persediaan pada bendahara keuangan SKPD dan atau BUD untuk bisa mengatur ketersediaan dana dengan waktu pelaksanaan kegiatan program kerja yang akan dilakukan.

Sering terjadi pada SKPD di kabupaten Balangan, saat kegiatan program kerja yang sudah dijadwalkan sesuai perencanaan namun pada saat jatuh tanggal pelaksanaan dana tidak tersedia di Kas dan atau anggaran kas SKPD. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini antara lain ; bisa dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara jadwal pelaksanaan kegiatan dengan ketersediaan anggaran kas, proses administrative dan juga yang sering terjadi adalah skala prioritas yang dibayarkan dan dialokasikan pada saat proses pengajuan pencairan bersamaan beberapa kegiatan yang bisa mengakibatkan ketersediaan anggaran Kas tidak cukup untuk merealisasikan secara bersamaan. Beberapa hal tersebut yang membuat sering terjadinya ketidakmaksimalan dalam penyerapan anggaran yang sudah ada dalam sebuah perencanaan dalam satu tahun.

Disamping itu, hal yang sangat menarik bahwa, pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) oleh SKPD kepada BUD selalu bertumpuk pada akhir-akhir bulan di semester II di tahun berkenaan, padahal ketersediaan secara menajemen kas sudah tersedia. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan keterlambatan pembayaran serta kegagalan bayar oleh BUD manakala melewati batas waktu akhir tahun anggaran berjalan dan mengakibatkan realisasi atau serapan anggaran tidak maksimal.

Sebagai bahan iilustrasi berikut data serapan anggaran di Pemerintah Kabupaten Balangan dalam tiga tahun terakhir :

Tabel 2
Realisasi Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten Balangan
Dalam 3 tahun terakhir (2019,2020 dan 2021)

No.	Tahun	Pagu Anggaran	Semester	Serapan Anggaran	Persentase
1	2019	1.486.963.188.409,21	I	427.324.945.727	29%
			II	1.356.599.928.084	91%
2	2020	1.482.934.888.033,75	I	404.905.957.701	27%
			II	1.347.204.173.628	91%
3	2021	1.317.888.588.949,00	I	321.497.679.582	24%
			II	1.094.695.917.395	83%

Sumber : Badan PengelolaanKeuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Balangan, 2022

Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa pagu anggaran belum terserap secara optimal, pada tahun 2019 pagu anggaran sebesar 1.486.963.188.409.21 pada semester pertamahanyaterserap 29 % dan semester kedua 91 %, di tahun 2020 paguanggaran 1.482.934.888.033.75 pada semester pertamaterserap 27 % dan semester keduaterserap 91 %, dan pada tahun 2021 paguanggaransebesar 1.317.888.588.949.00 pada semester pertamaterserap 24 % dan semester keduaterserap 83 %.

Pada table 2 terlihat bahwa dalam tiga tahun terakhir terjadi penurunan pagu anggaran yang bisa disebabkan karena serapan yang kurang maksimal pada setiap tahunnya. Hal ini sangat disayangkan, jikabisadimaksimalkan dalam upaya serapan anggaran yang sudah direncanakan akan jauh lebih baik dan bisa mempercepat proses pertumbuhan ekonomi dan perkembangan daerah sesuai dengan visi pemerintah Kabupaten Balangan yaitu “membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera”.

METODE

Jenis Penelitian ini adalah deskriptif Kuantitatif dengan menguji dan menganalisa pengaruh secara simultan dan parsial dari Perencanaan Anggaran (X1) dan Ketersediaan Anggaran Kas (X2) terhadap Optimalisasi Realisasi Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan. Denganjumlahresponden sebanyak 66 orang yang diambil menggunakan metode sensus atau sampel jenuh dimana seluruh Populasi yaitu Para pegawai pengelola keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan yang dijadikan responden penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil uji validitas instrument penelitian menunjukan seluruh instrument ≥ 0,30 dengan nilai signifikansi seluruh instrument beradadibawah 0,05 dapatdisimpulkan bahwa instrument dalam penelitian ini dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas menunjukan nilai koefisien alpha dari seluruh instrumen ≥0,60 yang berarti semua instrumen dalam penelitian ini dapat dipercaya keandalannya.

Hasil Uji AsumsiKlasik

Uji Normalitas pada grafik normal P-P Plot juga menunjukkan titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, dan sebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka diartikan model regresi ini memenuhi syarat menjadi model regresi yang baik dan layak dipakai untuk prediksi dan telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Heterokedastisitas berdasarkan grafik scatterplot, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak atau tidak membentuk suatu pola tertentu, tersebar dibawah maupun di atas angka nol pada sumbu Y. dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas, sehingga model regresi dalam penelitian ini layak dipakai prediksi.

Uji Multikolinearitas menunjukkan nilai VIF tidak ada yang mendekati angka 5,dapat dikemukakan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi yang digunakan dalan penelitain ini.

Uji Regresi Linier Berganda

Uji T (Parsial)

a. PerencanaanAnggaran (X1)

t hitung (0,572) < t tabel (1,66) maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan dari Perencanaan Anggaran terhadap Optimalisasi Realisasi Penyerapan Anggaran padaPemerintah Daerah Kabupaten Balangan.

b. Ketersediaan Anggaran Kas (X2)

T hitung (2,955) > t tabel (1,66). Maka dapat disimpulkan bahwa secara Secara parsial terdapat pengaruh signifikan dari Ketersediaan Anggaran Kas terhadap Optimalisasi Realisasi Penyerapan Anggaran padaPemerintah Daerah Kabupaten Balangan.

Uji F (Simultan)

Besarnya F hitung adalah121, 913jauh lebih besar dari F tabel (71,167) > f table (3,14) atau signifikansi F kurang dari 5% (0,000 < 0,05). Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari Perencanaan Anggaran dan Ketersediaan Anggaran Kas terhadap Optimalisasi Realisasi Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari Perencanaan Anggaran terhadap Optimalisasi Realisasi Penyerapan Anggaran. Hal ini menunjukan bahwa perencanaan yang sudah dilakukan dan diajukan dalam satu tahun anggaran idealnya sudah terencana dan tersusun dengan matang, sehingga pada tahun anggaran berjalan semua yang direncanakan dapat direalisasikan.

Hasil pengamatan peneliti di lapangan saat melakukan penelitian dan wawancara singkat bersama para pengelola keuangan disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah mengisyratkan bahwa perencanaan yang dilakukan pada satu tahun sebelumnya akan termuat dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang akan dilaksanakan pada tahun pelaksanaan anggaran yang membuat serapan anggaran bisa berjalan maksimal atau tidak.

Perencanaan dilakukan dengan output atau luaran yang terukur, dan sesuai dengan kebutuhan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing masing di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan. Perencanaan yang dilakukan juga sudah sesuai dengan visi dan misi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan sehingga semua SKPD mempunyai dasar panduan output yang mengarah kepada visi misi kemajuan Kabuopaten secara keseluruhan. Hal inilah yang membuat perencanaan anggaran yang dilakukan setiap SKPD bisa sejalan dengan Realisasinya.

Sistem Perencanaan Anggaran dalam setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sangat berperan penting dalam performa kerja setiap instansi. Semakin matang dan optimal perencanaan yang dilakukan akan sangat memudahkan dalam realisasi program kerja yang telah disusun dan direncanakandalam satu tahun kedepan yang muaranya adalah kemajuan daerah yang dalam hal ini kabupaten yang dapat terlihat dari optimalisasi serapan anggaran pada tahun pelaksanaan secara realistis dan maksimal.

Dari hasil penelitian ini juga diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari Ketersediaan Anggaran Kas terhadap Optimalisasi Realisasi Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan. Hal ini menerangkan bahwa ketersediaan Anggaran kas pada pengelola keuangan atau bendahara di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sangat berpengaruh dalam serapan anggaran. Ketersediaan anggaran kas inisepaututnya sudah sesuai dengan waktu pelaksanaan setiap item kegiatan yang sudah tersusun dalam perencanaan anggaran dan program rancana kerja di Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga pada saaat kegiatan ingin dilaksanakan ketersediaan anggaran kas di pengelola keuangan sudah siap untuk di realisasikan.

Sering terjadi pada SKPD di kabupaten Balangan, saat kegiatan program kerja yang sudah dijadwalkan sesuai perencanaan namun pada saat jatuh tanggal pelaksanaan dana tidak tersedia di Kas dan atauanggaran kas SKPD. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini antara lain ;bisadikarenakan adanya ketidaksesuaian antara jadwal pelaksanaan kegiatan dengan ketersediaan anggaran kas, proses administrative dan juga yang sering terjadi adalah skala prioritas yang dibayarkan dan dialokasikan pada saat proses pengajuan pencairan bersamaan beberapa kegiatan yang bisa mengakibatkan ketersediaan anggaran Kas tidak cukup untuk merealisasikan secara bersamaan. Beberapa hal tersebut yang membuat sering terjadinya ketidakmaksimalan dalam penyerapan anggaran yang sudah ada dalam sebuah perencanaan dalam satu tahun.

Disamping itu, hal yang sangat menarik bahwa, pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) oleh SKPD kepada BUD selalu bertumpuk pada akhir-akhirbulan di semester II ditahun berkenaan, padahal ketersediaan secara menajemen kas sudah tersedia. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan keterlambatan pembayaran serta kegagalan bayar

oleh BUD manakala melewati batas waktu akhir tahun anggaran berjalan dan mengakibatkan realisasi atau serapan anggaran tidak maksimal.

Hal ini dapat digambarkan pada tabel 2 diatas dia mana penyerapan anggaran yang diartikan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan rata-rata pada semester kedua dalam rahun anggaran.

Tabel 3
Realisasi Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten Balangan
Dalam 3 tahun terakhir (2019, 2020 dan 2021)

No.	Tahun	Pagu Anggaran	Semester	Serapan Anggaran	Persentase
1	2019	1.486.963.188.409,21	I	427.324.945.727	29%
			II	1.356.599.928.084	91%
2	2020	1.482.934.888.033,75	I	404.905.957.701	27%
			II	1.347.204.173.628	91%
3	2021	1.317.888.588.949,00	I	321.497.679.582	24%
			II	1.094.695.917.395	83%

Sumber : Badan PengelolaanKeuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Balangan, 2022

Pada tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa pagu anggaran belum terserap secara optimal, pada tahun 2019 paguanggaransebesar 1.486.963.188.409.21 pada semester pertamahanyaterserap 29 % dan semester kedua 91 %, di tahun 2020 pagu anggaran 1.482.934.888.033.75 pada semester pertama terserap 27 % dan semester kedua terserap 91 %, dan pada tahun 2021 pagu anggaran sebesar 1.317.888.588.949.00 pada semester pertama terserap 24 % dan semester kedua terserap 83 %.

Dari data diatas dapat artikan bahwa sangat besar dan signifikan pengaruh dari ketersediaan anggaran kas dalam menunjang optimalisasi realiasi penyerapan anggaran disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kabupaten Balangan yang akan dilaporkan kepada Negara melalui Laporan Realisasi Anggaran yang tujuannya adalah menilai serapan anggaran yang disediakan Negara dari dasar Perencanaan Anggaran ditahun sebelumnyaapakahsudahberjalan optimal. Dari laporanrealisasi anggranini akan menjadi dasar pertimbanagana lokasi jumlah pagu anggaran yang disediakan pada tahun berikutnya.

Penelitian ini juga menjelaskan terdapat Pengaruh signifikan secara simultan dari Perencanaan Anggaran dan Ketersediaan Anggran Kas terhadap Optimalsasi Realisasi Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan. Hal ini menunjukan bahwa perencanaan anggaran yang baik dan terukur serta didukung dengan ketersediaan Anggran kas pada saat kegiatan sudah terjadwal dan dialkukan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada BUD.

Optimalsisasi Realisasi Penyerapan anggaran dapat dicapai jika perencanaan dan ketersediaan anggaran kas dapat bersinergi sesuai dengan penjadwalan kegiatan yang sudah tersusun dalam rencana kerja dalam satu tahun. Perencanaan merupakan titik awal dalam setiap penentuan program kerja dalam satu tahun kedepan, proses perencanaan bersumber dari analisis kebutuhan dari setiap SKPD dalam menunjang program kerja yang sudah dirumuskan berdasarkan visi dan misi SKPD serta didukung dengan ketersediaananggran kas yang sesuai dengan penjadwalan pencairan dari pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) maka akan berpengaruh signifikan terhadap Optimalisasi Realisasi Penyerapan Anggaran yang tentunya berujung kepada kemajuan perekonomian dan perkembangan daerah di Kabupaten Balangan.

KESIMPULAN

1. Perencanaan Anggaran tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Optimalisasi Realisasi Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, dibuktikan dengan hasil uji t, dengan nilai t hitung 0,572 lebih kecil dari nilai t table 1,66 dengan taraf signifikan (α) sebesar 0,05 atau α=5%. Jadi Hipotesis Pertama ditolak atau tidak diterima.
2. Ketersediaan Anggaran Kas berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Optimalisasi Realisasi Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, dibuktikan dengan hasil uji t, dengan nilai t hitung 2,955 lebih besar dari nilai t table 1,66 dengan taraf signifikan (α) sebesar 0,05 atau α=5%. Jadi Hipotesis kedua diterima
3. Perencanaan Anggaran dan Ketersediaan Anggaran Kas berpengaruh secara simultan terhadap Optimalisasi Realisasi Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Daerah

Kabupaten Balangan, dibuktikan dengan hasil uji F dengan nilai F hitung 71,167 lebih besar dari nilai F tabel 3,14 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari (α) sebesar 0,05 atau α = 5%, maka hipotseis ketiga dapat diterima.

DAFTAR PUSTAKA

Afiah, Nunuy Nur. 2010. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governmental Governance (StudiEmpiris pada Faktor-Faktor: Kompetensi Aparatur, KompetensiAnggota DPRD, Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi, Penganggaran, dan Kualitas Informasi Keuangan*). Jurnal Akuntansi Tahun XIV, No. 2, Mei 2010: 192-200.*

Armana, Acang. 2016. *Pengaruh Kinerja Satuan Pengawasan Internal terhadap Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (Suatu Study pada Organisasi Rumah Sakit).* Tesis. Program Magister Manajemen. Fakultas PascaSarjana Universitas Pasundan, Bandung.

Basuki, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif,* Penerbit Media Sains Indonesia, Bandung.

Basuki, I Rajiani, R Widyanti, 2021, Boosting Sustainability Performance Through Supply Chain Quality Management In The Mining Industry, *Polish Journal of Management Studies 24 (2), 41-54*

Basuki, Widyanti Rahmi, M Mursanto, 2021, Kapasitas Knowledge Management Untuk Meningkatkan Kerjasama Dan Inovasi Dalam Perusahaan (Suatu Tinjauan Teoritis), *AL-ULUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 7 (2)*

Bazar, Gani. 2011. Hambatan dalam Mewujudkan Good Governance. Artikel. (http://m/kompasiana.com/ganibazar). Diakses 18 Maret 2017.

Dodopo, Yoki, Jullie J. Sondakh dan JantjeTinangon. 2017. PengaruhKomitmenOrganisasi, Pengendalian Intern Akuntansi, Peran Internal Audit, Pendidikan, dan KualitasPelatihanterhadapKeterandalanLaporanKeuangan pada SKPD PemerintahKabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing: Good Will. Vol.8, Buku 1: 22-31*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi Manado.

Enceng, Liestyodono B. I., dan Purwaningdyah, M. W. 2008. Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dalamMewujudkan Good Governance. *Jurnal Pusat Kebijakan dan Manajemen PNS, Volume 2, No. 1 juni 2008*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN.

Fahmi, Irham. 2014. PerilakuOrganisasiTeori, Aplikasi, dan Kasus. Bandung: Alfabeta.

Flippo B. E. 2000. Manajemen Personalia, Terjemahan. Jakarta: Erlangga.

Habibie. 2013. Pengaruh Pengawasan DPRD, Pengendalian Internal, dan Peran Auditor Internal terhadap Good Governance (StudiEmpiris pada Pemerintah Kota Solok). Ejounalakuntansi Universitas Negeri Padang, Vol.1, No.1 (2013), seri H: 1-21.

Hanpuwadal, Nupakorn dan Ussahawanitchakit, Phapruke. 2010. Accounting Practice Effectiveness and Financial Performance of Thai Listed Firms: Mediating Effects of Decision Making Efficiency for Tax Management, Competent Resource Allocation, and Strategic Planning Success. European Journal of Management. Vol. 10, Issue 1.

Jermier, J. M., Slocum Jr., J.W, Fry, L.W., dan Gaines, J. 1991. Organizational Subculture in a Soft Bureaucracy: Resistance Behind the Myth and Facade of an Official Culture. Organization Science (Mei 1991). p:170-194.

Krina P., LoinaLalolo. 2003. Indikator dan Alat UkurPrinsipAkuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

LAN dan BPKP. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lenda, Siti Nurlily. 2013. PengaruhBudayaBirokrasiterhadap Kinerja Aparatur di Sekretariat Daerah KabupatenBolaangMongondow Utara. Journal Acta Diurna Vol. 2, No. 4 Tahun 2013.

Lestari, Morita Indah. 2013. Pengaruh Budaya Organisasi dan Pengendalian Intern terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (StudiEmpiris pada Rumah Sakit Umum di Kota Padang). *Jurnal Akuntansi Vol. 1, No. 3.*

Manossoh, Hendrik. 2015. Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Good Government Governance pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 15 No. 05 Tahun 2015*. Manado: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi.

Mardiasmo. 2002. Elaborasi Reformasi AkuntansiSektor Publik: Telaah Kritis terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. JurnalAkunting dan Auditing, Vol. 6 No.1, p:63-82

Mardiasmo, Diaswati, Barnes, Paul dan Sakurai, Yuka. 2008. Implementation of Good Governance by Regional Governments in Indonesia. The Twelfth Annual Conference of the International Research Society for Public Management (IRSPM XII), pages pp. 1-36. Brisbane, Australia.

Mathis, Robert L. dan Jackson, John H. 2006. *Human Resource Management*. Jakarta: SalembaEmpat.

Pazri, Muhamad. 2016. ImplementasiPrinsip Good Governance dalamSistemPengelolaanKeuangan Daerah di Indonesia. *Badailama Law Journal, vol. 1 Issues 2, September 2016.*

Peraturan Bupati Balangan No. 107 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Permendagri NO. 77 Tahun2020.. PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

_____. 2008. Peraturan PemerintahNomor 60 Tahun 2008 tentangSistemPengendalian Intern Pemerintah.

_____. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

_____. 2003. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Ramanda, Irfan; Widyanti, Rahmi; Basuki; 2021, Pengaruh Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas Dan Profitabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode Tahun 2016-2020, *Al Ulum Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, Volume 8, No. 1, 45-54.*

Ristanti, Ni Made Asih, Sinarwati, NihKadek, dan Sujana, Edy. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Komitmen Organisasi terhadap Penerapan Good Governance (StudiKasus pada SatuanKerjaPerangkat Daerah Kabupaten Tabanan). *E-jurnal Program Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 2, No. 1:2-14.*

Robbins, S.P. dan Judge, T.A. 2016. *Perilaku Organisasi: Organizational Behavior*. Jakarta: Salemba Empat.

Ruspina, DepiOktia. 2013. Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, SistemPengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadapPenerapan Good Governance (StudiEmpiris pada Pemerintah Kota Padang). Ejournal Universitas Negeri Padang, *JurnalAkuntansi, 1(3): 1-24*

Sari, Diana. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, PenyelesaianTemuan Audit terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Penelitian pada Pemerintah Daerah di ProvinsiJawa Barat dan Banten). *Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado, 25-28 September. Universitas Widyatama Bandung. Sesi 1/10: 1007-1048.*

Sari, Eka Nurmala. 2012. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik serta Dampaknya terhadap Good Governance Studi pada SatuanKerja Perangkat Daerah di Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis vol 12 no.2 :25-54*.

Sari, MayliaPramono dan Raharja. 2012. Peran Audit Internal dalamUpayaMewujudkan Good Corporate Governance (GCG) pada Badan LayananUmum (BLU) di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin 20-23 September.*

Sugiyono. 2014. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Bandung: PenerbitAlfabeta.

Syamsir, Toni. 2014. Pengaruh Peran Inspektorat dan BudayaOrganisasi Daerah terhadapPenerapan Good Governance (StudiEmpiris Pada Pemerintah Kota Bukittinggi). *Ejournal Universitas Negeri Padang. JurnalAkuntansi, Vol.2 No. 3 (2014) Seri B: 1-21*.

Tuasikal, Askam. 2009. PengaruhPengawasan, PemahamanSistemAkuntansiKeuangan dan PengelolaanKeuanganterhadap Kinerja Unit SatuanKerjaPemerintah Daerah (Studi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Maluku). *Jurnal Akuntansi, Vol.10, No.6 :66-88.* Ambon: Universitas Pattimura.

Verasvera, FebrinaAstria. 2016. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja AparaturPemerintah Daerah (StudiKasus pada Dinas SosialProvinsiJawa Barat). Jurnal *Manajemen, Vol.15, No.2, Mei 2016*. Magister Manajemen Universitas KatolikParahyangan.

Wakhyudi. 2010. *Pemberdayaan Peran Audit Internal dalamMewujudkan Good Governance pada Sektor Publik.* Artikel. BPKP.

Widyanti, Rahmi, 2020, *Perilaku Organisasi: Teori dan Konsep*, Penerbit Media Sains Indonesia, Bandung

Wiratno, A., Pratiwi, U. dan Nurkhikmah. 2013. PengaruhBudayaOrganisasi, Gaya Kemimpinan, KomitmenOrganisasi dan Pengendalian Intern terhadapPenerapan Good Governance sertaImplikasinya pada Kinerja (Survey pada Kantor PelayananPerbendaharaan Negara Tegal). *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers (SCA-3). Universitas JenderalSoedirman. Jurnal Vol. 3, No. 1 (2013) :1-8.*